

Quo Vadis Yayasan Sebelas April Sumedang?

Kepergian Dr. H. Endang Sukandar, M.Si. meninggalkan problematika menarik dalam segala bidang termasuk arah politik Sekolah-Sekolah Tinggi di bawah Naungan Yayasan Sebelas April Sumedang (YPSA). Dr. H. Endang Sukandar, M.Si. seorang politikus handal juga memimpin YPSA sehingga YPSA merupakan kendaraan politik informal menuju jabatan-jabatan politik baik di tingkat Kabupaten Sumedang (anggota dan Ketua DPRD, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, anggota DPR maupun Bupati Sumedang). Oleh karena itu, arah politik sang pemimpin YPSA menjadi arah politik YPSA.

Seperti diketahui YPSA pernah menjadi sarang partai politik berbagai beringin berwarna kuning, sebelum menjadi rumah umat Islam berwarna hijau. Pertanyaannya, apakah YPSA tetap akan didominasi warna hijau dalam setiap aktivitasnya setelah sang pemimpin meninggalkan pengikutnya?

Para pemimpin YPSA dan sekolah-sekolah tinggi sebaiknya memiliki kecerdasan yang cukup dalam menghadapi perubahan lingkungan politik yang terjadi? Perguruan-perguruan tinggi di bawah naungan YPSA ibarat gadis seksi yang diperbutkan, jelek-jelek. Secara kuantitas, civitas akademika perguruan-perguruan tinggi di bawah naungan YPSA memiliki suara pemilih yang cukup signifikan karena itu pasti akan menjadi rebutan partai politik yang ingin mendulang suara dari civitas akademika.

Namun demikian, yang harus kita sadari bahwa selama ini civitas akademika bersatu karena dalam mendukung Dr. H. Endang Su-



BERPHOTO: Para pupuhu YPSA berfoto bersama usai Gelar Budaya Sunda yang diselenggarakan dalam rangkaian acara wisuda ke-XXX tahun 2013 PTSA dan STMIK Sumedang, beberapa waktu lalu.

DOK/RADAR SUMEDANG

kandar, M.Si dalam memenuhi syarat politiknya. Civitas akademika perguruan-perguruan tinggi YPSA sebenarnya memiliki ideologi dan afiliasi politik beragam, bukan hanya satu partai. Sekali lagi bukan hanya satu partai. Di dalamnya ada yang berafiliasi pada Partai Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, PKS, dan bahkan NASDEM.

Arah politik YPSA ke depan jelas wajib mengedepankan politik yang cerdas, yaitu arah politik YPSA adalah kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan YPSA sendiri. Artinya

perjuangan politik YPSA adalah memperjuangkan tercapainya kesejahteraan rakyat dan bagaimana eksistensi YPSA. Partai politik mana saja yang sejalan dengan politik YPSA ini harus didukung oleh civitas akademika.

Dengan demikian, secara institusi YPSA harus netral, memberikan peluang yang sama untuk kepada setiap partai politik tetapi memberikan kesempatan kepada individu untuk berpolitik praktis menjadi pendukung atau bahkan anggota partai politik. Catatan penting YPSA lain adalah

bahwa civitas akademika tidak sedikit yang berstatus PNS. Akan lebih baik manakala mereka menjadi surtauladan bagi *law enforcement*.

PP Nomor 53 Tahun 2010 menggariskan bahwa PNS wajib netral, tidak boleh menjadi simpatisan apalagi menjadi anggota partai politik. PNS tidak boleh ikut-ikutan mendukung mendukung. Sanksi bagi yang melanggar disiplin PNS ini adalah pemecatan.

(Oleh: Akadun, Pembantu Ketua I STTA Sebelas April Sumedang)